

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kohar,(2014), *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung , hlm. 142.
- Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, , hlm.172.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chindir Ali, (2011), *Badan Hukum, Alumni : Bandung*, hml. 133
- Edmon Makarim, (2018), *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Edisi Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 7
- Freddy Harris dan Leny Helena. (2017), *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm 133.
- Gunawan Widjaja. (2005)*Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 78.
- Habib Adjie, (2015) *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, , hlm.157.
- Hartini Sulihandari, (2013) *Prinsip-prinsip dasar profesi notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, , hlm 3.
- Herlien Budiono, (2013), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm.19.
- Liliana Tedjosaputro, (2003), *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, , hlm. 84
- Pujiyono, (2014), *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo : Surakarta, hlm. 58
- Ridwan Khairandy, (2013), *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press : Yogyakarta, hlm. 26.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur : Bandung, hlm. 67.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2003), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 13

Tesis

- Ermin Marikha, (2016), Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya, Tesis
- F.X. Kartika Ratri.(2011), Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 66.
- Herlina Ernawati Napitupulu. (2017) ,”Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara”. Tesis,Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 74
- Kartika Ratri, 2011, Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 66.

Jurnal

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, (2018), Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.228
- Artha Uly Tambunan, (2020), Rangkap Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol.3 No.1, hlm.3.
- Ayuningtyas, Pratiwi. (2020) "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9.2: 95-104.
- Darusman, Yoyon Mulyana. (2016),"Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.1 : hlm 36-56
- Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, (2018)*Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1
- Hidayat, Agung. Critical Review Buku “Penelitian Hukum, (2021)” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.2: hlm 117-125.
- Ina Zakhina, (2016), “Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 3-4
- Kunni Afifah, (2017), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, hlm.150

- Laurensius Arliman, (2016). Hak Ingkar (*Verschoningsplicht*) Atau Kewajiban Ingkar (*Verschoning Splicht*) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal hukum Doctrinal*, Volume 1, Nomor 1, hlm.7
- Ni Nyoman Juliantari, (2013), Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, hlm. 4.
- Prasetya Agung, (2016), Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 3 Nomor 4, hlm.5
- Pratis Widyalestari, (2017) “Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 , hlm. 3
- Ruslan, (2013), Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1 No.5 , hlm.3
- Sarihartati, (2018), Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan, hlm..90
- Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, (2016) Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*

Peraturan Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- permenkumham RI Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- Permenkumham RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas
- Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.